

PERENCANAAN KINERJA UKPBJ



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI



2022

BIRO UMUM

BAGIAN
LAYANAN
PENGADAAN



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Tb. Muhammad Ihsan
Jabatan : Kepala Bagian Layanan Pengadaan/Kepala UKPBJ

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Arianto Surojo
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

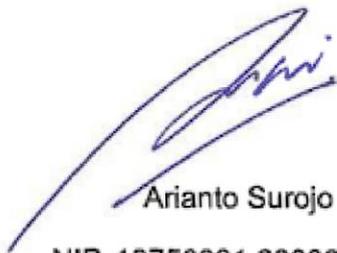
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Arianto Surojo

NIP. 19750331 200003 1 001



Tb. Muhammad Ihsan

NIP. 19810202 200603 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan Dokumen Perencanaan Kinerja Pengadaan Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan dan pengukuran kinerja di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Dokumen Pencapaian Kinerja Pengadaan Tahun 2022. Penyusunan Dokumen ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian Kami menyadari bahwa dokumen ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai guna dokumen ini ke depannya.

Diharapkan Dokumen Perencanaan Kinerja Pengadaan Tahun 2022 ini akan memberikan manfaat yang nyata khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan layanan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Kepala Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa



Tb. Muhammad Ihsan

NIP 19810202 200603 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | 4 |
| BAGIAN I | |
| PENDAHULUAN | 5 |
| BAGIAN II | |
| INDIKATOR KINERJA PENGADAAN | 9 |
| BAGIAN III | |
| INDIKATOR KINERJA PENGADAAN | 11 |
| BAGIAN IV | |
| BASELINE DAN TARGET KINERJA | 14 |
| BAGIAN V | |
| RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA | 15 |
| PENUTUP | 16 |

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2022 yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Layanan Pengadaan memiliki tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan mendukung proses Pengadaan Barang/Jasa Kesekjenan dan seluruh Satker Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bagian Layanan Pengadaan/UKPBJ terus berupaya meningkatkan manajemen kinerja dengan berpedoman pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan kaidah yang berlaku.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri Tahun 2022 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Hasil Pencapaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai jalur komunikasi atau pelaporan pencapaian kinerja yang dapat digunakan selama satu tahun baik dalam bentuk cetak, sistem informasi online, maupun dalam bentuk presentasi kepada pemangku kepentingan

D. TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Bagian Layanan Pengadaan merupakan salah satu Bagian pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan Permenlu No .6 Tahun 2021 pasal 133, Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang meliputi persiapan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

Bagian Layanan Pengadaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

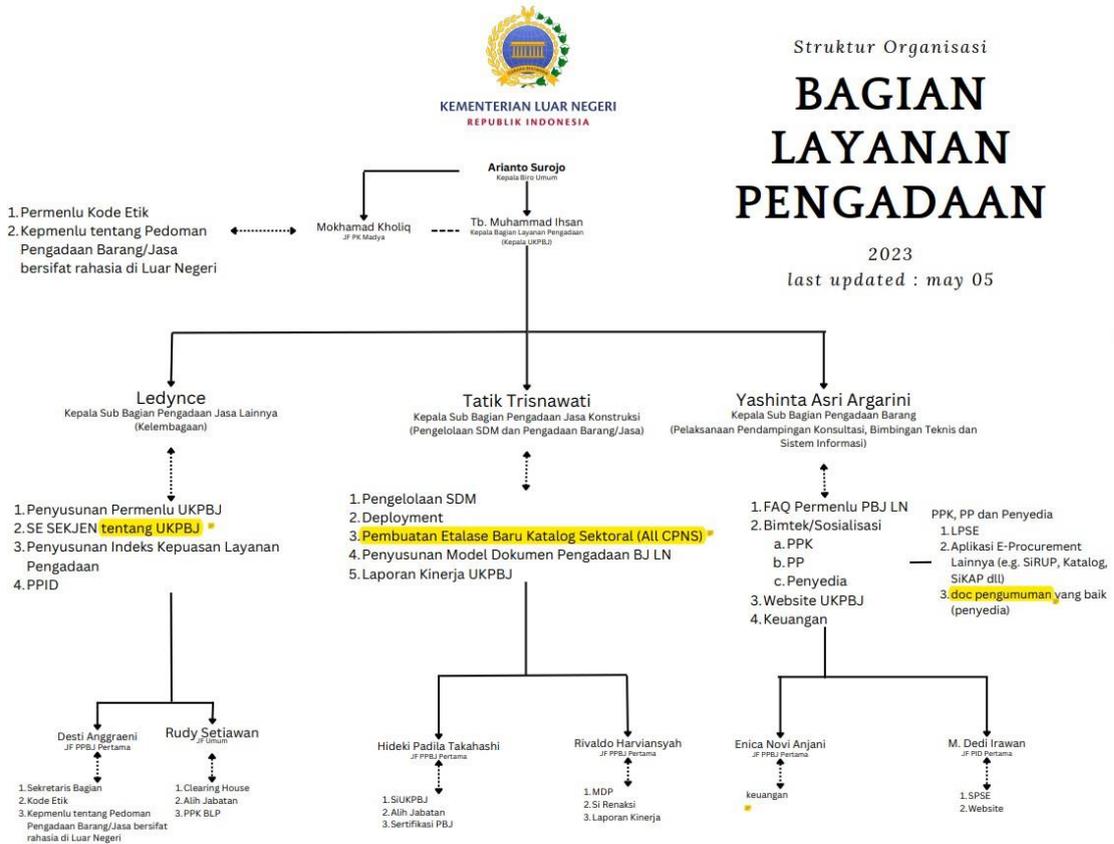
- a. Persiapan dan pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Koordinasi dengan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. Pendampingan konsultansi, sosialisasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Merujuk poin b di atas, fungsi Bagian Layanan Pengadaan berupa koordinasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), karena fungsi LPSE masih berada pada Satuan Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2021 Pasal 706. Adapun Kepala Bagian Layanan Pengadaan, karena sifat tugas dan fungsinya, menjabat sekaligus sebagai Kepala Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan Permenpan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga, besaran organisasi UKPBJ ditetapkan berdasarkan kriteria yang merupakan penilaian terhadap komponen yang berpengaruh pada beban kerja UKPBJ yang dihitung berdasarkan rata-rata dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hasil penghitungan ukuran organisasi UKPBJ yang telah dilakukan oleh Biro Umum Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2022, ukuran UKPBJ Kementerian Luar Negeri memiliki nilai 62,19 atau dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator (Kepala Bagian).

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum terdiri atas, yaitu:



F. OBJEKTIF DAN INDIKATOR STRATEGIS PENGADAAN

Objektif dan Indikator Strategis Pengadaan yang diselenggarakan oleh UKPBJ Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

| Objektif (Sasaran Kinerja) | Indikator Strategis | Area Pengukuran |
|---|---|-----------------|
| Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan | Waktu |
| | Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa | Biaya |
| | Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa | Kualitas |
| Terwujudnya Kinerja UKPBJ yang Baik | Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal | Tingkat Layanan |

BAGIAN II

INDIKATOR KINERJA PENGADAAN

2.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sasaran Kinerja (SK) | Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang Jasa di seluruh Komponen Kementerian Luar Negeri |
| Indeks Kinerja Utama (IKU) | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan |
| Keterangan | Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri mengajukan Nota Dinas usulan proses Tender/Seleksi/Tender Cepat untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penelaahan dan penerbitan surat tugas kelompok kerja pemilihan oleh Kepala UKPBJ. Tindak lanjut dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran |

2.2 Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objektif Kegiatan (OK) | Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang Jasa di seluruh Komponen Kementerian Luar Negeri |
| Indeks Kinerja Utama (IKU) | Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa |
| Keterangan | Kelompok Kerja Pemilihan berupaya untuk mengedepankan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu efisiensi anggaran. Upaya untuk memanfaatkan alokasi anggaran Pengadaan Barang/Jasa secara tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi dapat dilihat dari adanya selisih pagu anggaran pada RUP atau dari HPS dengan realisasi nilai kontrak yang disepakati. |

2.3 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Paket Pengadaan

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objektif Kegiatan (OK) | Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang Jasa di seluruh Komponen Kementerian Luar Negeri |
| Indeks Kinerja Utama (IKU) | Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa |
| Keterangan | Memastikan terlaksananya proses pengadaan barang/jasa yang diusulkan ke UKPBJ mulai dari penelaahan dokumen, proses pemilihan, dan penetapan penyedia. |

2.4 Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objektif Kegiatan (OK) | Terwujudnya Kinerja UKPBJ yang baik |
| Indeks Kinerja Utama (IKU) | Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal |
| Keterangan | UKPBJ memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan dan sesuai standar operasional prosedur yang sudah ada. Untuk memastikan pelayanan UKPBJ pada tahun 2022 berjalan dengan baik maka UKPBJ Kementerian Luar Negeri menyebarluaskan Kuesioner Kepuasan Layanan yang mana targetnya adalah <i>stakeholder</i> /internal dan penyedia/eksternal sebagai bahan evaluasi UKPBJ agar kedepannya dapat memberikan pelayanan maksimal. |

BAGIAN III INDIKATOR KINERJA PENGADAAN

3.1 Sasaran Kinerja 1 - Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa

A. IKU 1 - Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

| | |
|----------------------------|---|
| Area Pengukuran | Waktu |
| Sumber Data | SIRUP dan LPSE |
| Frekuensi Penilaian | Tahunan |
| Formula | <p>Dari Segi Jumlah Paket</p> $= \frac{\text{Jumlah Paket pengadaan selesai tepat waktu}}{\text{Total jumlah paket pengadaan}} \times 100\%$ <p>Dari Segi Nilai Pagu Anggaran:</p> $= \frac{\text{Nilai Paket pengadaan selesai tepat waktu}}{\text{Total paket pengadaan}} \times 100\%$ |
| Kriteria Pencapaian | $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ <p>Baik: >80 Cukup: 65-80 Kurang: <65</p> |
| Arah Pengukuran | Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Pengadaan. |

B. IKU 2 - Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

| | |
|----------------------------|--|
| Area Pengukuran | Biaya |
| Sumber Data | Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai Pagu, HPS, dan Nilai Kontrak) |
| Frekuensi Penilaian | Tahunan |

| | |
|----------------------------|--|
| Formula | <p>Efisien dari Pagu:</p> $= \frac{\text{Total Pagu} - \text{Total Kontrak}}{\text{Total Pagu}} \times 100\%$ <p>Efisiensi dari HPS:</p> $= \frac{\text{Total HPS} - \text{Total Kontrak}}{\text{Total HPS}} \times 100\%$ |
| Kriteria Pencapaian | $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ <p>Baik: >80 Cukup: 65-80 Kurang: <65</p> |
| Arah Pengukuran | Semakin tinggi presentase, semakin baik kinerja Pengadaan. |

C. IKU 3 - Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa

| | |
|----------------------------|---|
| Area Pengukuran | Kualitas |
| Sumber Data | Pokja Pemilihan dan LPSE |
| Frekuensi Penilaian | Tahunan |
| Formula | <p>Dari Segi Jumlah Paket</p> $= \frac{\text{Total Jumlah Paket Pengadaan yang jadwalnya selaras dengan RUP}}{100\% \times \text{Total jumlah Paket Pengadaan}} \times 100\%$ |
| Kriteria Pencapaian | $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ <p>Baik: >80 Cukup: 65-80 Kurang: <65</p> |
| Arah Pengukuran | Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Pengadaan. |

3.1 Sasaran Kinerja 2 - Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa

D. IKU 1 - Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

| | |
|----------------------------|--|
| Area Pengukuran | Tingkat Layanan |
| Sumber Data | Hasil Kuesioner Kepuasan Layanan UKPBJ (Internal dan Eksternal) |
| Frekuensi Penilaian | Tahunan |
| Formula | $= \frac{\text{Jumlah pelanggan yang puas (internal Kemu)}}{\text{Jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Jumlah pelanggan yang puas (Eksternal Kemu)}}{\text{Jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner}} \times 100\%$ |
| Kriteria Pencapaian | $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ <p>Baik: >80 Cukup: 65-80 Kurang: <65</p> |
| Arah Pengukuran | Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Pengadaan. |

BAGIAN IV BASELINE DAN TARGET KINERJA

| Area Pengukuran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Kategori | Baseline 2021 | Target | |
|-----------------|---|-------------------------------|---------------|--------|------|
| | | | | 2022 | 2023 |
| Waktu | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan | Jumlah Paket | 100% | 100% | 100% |
| | | Pagu Anggaran | 100% | 100% | 100% |
| Biaya | Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa | Pagu Anggaran | 8% | 8% | 8% |
| | | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | 8% | 8% | 8% |
| Kualitas | Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa | - | 100% | 100% | 100% |
| Tingkat Layanan | Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal | Internal dan Eksternal | - | 100% | 100% |

BAGIAN V

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

| Indikator Kinerja Utama | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan | Target |
|---|---|----------------------|---|
| Ketepatan Waktu Perencanaan dan Pelaksanaan Paket Pengadaan | Optimalisasi dan percepatan penginputan RUP di aplikasi SiRUP | Januari s.d Maret | Seluruh KPA dan PPK |
| | Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini | Januari s.d Februari | Seluruh Staf di UKPBJ Kementerian Luar Negeri |
| Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa | Memberikan fasilitas pendampingan bagi PPK dalam penyusunan HPS dan Perancangan Kontrak | Berkelanjutan | PPK |
| Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan barang/Jasa | Monitoring atas proses pemilihan secara berkala dan berkelanjutan | | PPK dan Pokja Pemilihan |
| | Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Kelompok Kerja Pemilihan dan PPK | Setiap Akhir Bulan | PPK dan Pokja Pemilihan |
| Tingkat Kepuasan Pelayanan UKPBJ | Menyebarkan Kuesioner kepuasan atas pelayanan UKPBJ kepada pihak internal (<i>stakeholder</i>) maupun eksternal (<i>penyedia</i>) | Januari s.d Maret | Pihak Internal dan Eksternal |

PENUTUP

Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) terus diupayakan untuk diterapkan dalam setiap proses organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, salah satunya adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja Pengadaan Tahun 2022 disusun sebagai alat-alat kendali dan alat ukur kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan adanya laporan perencanaan kinerja ini, diharapkan Indeks-Indeks Kinerja Utama yang direncanakan akan tercapai di tahun 2022 melebihi baseline tahun 2021.